

Pemberdayaan Masyarakat

by Machya Dewi

Submission date: 05-Mar-2022 06:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 1777091896

File name: Semnas_LPPM.doc (80K)

Word count: 2339

Character count: 16331

3
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA PERBATASAN
DI KABUPATEN MERAUKE**

Machya Astuti Dewi¹⁾ dan Meilan Sugiarto²⁾
FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta
machdewi@yahoo.com

Abstract

Urgensi pengentasan kemiskinan di kawasan perbatasan merupakan hal yang penting. Di tengah situasi dimana masih kuatnya pendekatan keamanan dalam pengelolaan perbatasan, maka pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan “sadar wisata perbatasan” dalam rangka mengembangkan pariwisata perbatasan merupakan pendekatan yang penting. Hal ini diharapkan mampu membangun ketahanan sosial ekonomi masyarakat perbatasan karena pergeseran kesejahteraan dalam pengelolaan perbatasan dapat menjadi satu pijakan bagi proyek pengentasan kemiskinan di kawasan perbatasan.

A. PENDAHULUAN

4
Merauke merupakan salah satu kabupaten di Papua yang secara geografis berada di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Potensi yang tampak adalah adanya kunjungan wisatawan lokal maupun luar Merauke untuk sekedar berakhir pekan dan melihat aktivitas perdagangan tradisional masyarakat suku Weam dan Wereaber dan sekali waktu ada pedagang dari Papua Nugini (PNG). Aiptu Ma'ruf, pernah melakukan pengolahan lokasi perbatasan tersebut menjadi taman yang menarik dan bersih (Saepudin, Rachmawati dan Fauzan, 2014), sehingga mampu menarik minat wisatawan dan menghidupkan pasar tradisional untuk aktivitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia antara lain: 1) batas wilayah dan penegakan hukum (Sasmini, 2007;

Arsana, 2010); 2) pengelolaan kawasan perbatasan (Rachmawati dan Fauzan,2013; Panda, 2015); dan 3) institusi pengelola perbatasan (Rachmawati dan Fauzan,2012; Partnership,2011). Di Merauke sendiri, masalah utama perbatasan adalah institusi pengelola perbatasan, dimana pendekatan keamanan dan tumpang tindihnya institusi pengelola perbatasan masih terjadi. Pendekatan keamanan menjadikan militer sebagai pemeriksa utama pelintas batas yang seharusnya dilakukan petugas imigrasi untuk memeriksa dokumen, petugas bea cukai untuk memeriksa barang bawaan dan petugas karantina untuk memeriksa kesehatan hewan ternak atau tanaman yang dibawa oleh pelintas batas. Badan Pengelola Perbatasan Daerah sudah ada namun belum jelas kewenangannya di lapangan, sehingga seringkali belum mampu menyelesaikan persoalan praktis yang ada di lapangan (Rachmawati dan Fauzan, 2013).

Perbedaan persepsi dalam mengelola perbatasan menjadikan aktivitas sosial ekonomi yang pernah tumbuh di perbatasan kembali pudar. Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri dalam upaya pengembangan kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat dan lokal sendiri, belum menemukan sebuah kebijakan dan program yang mampu memberikan pondasi bagi pengembangan aktivitas sosial ekonomi di perbatasan.

Urgensi pengentasan kemiskinan di kawasan perbatasan merupakan hal yang penting. Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan “sadar wisata perbatasan” dalam rangka mengembangkan pariwisata perbatasan merupakan pendekatan yang penting. Hal ini diharapkan mampu membangun ketahanan sosial ekonomi masyarakat perbatasan, dimana melalui pendekatan ini pula masyarakat dapat memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi budaya dan lingkungan yang ada di sekelilingnya guna meningkatkan kesejahteraan. Kesadaran dan kemauan masyarakat dapat menjadi modal utama pengembangan pariwisata perbatasan dengan dukungan pemerintah lokal dan pusat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pariwisata dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Studi mengenai industri pariwisata dalam menopang perekonomian masyarakat menunjukkan adanya ⁵ dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar (Dritsakis, 2012). Industri pariwisata memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat lokal untuk bertemu dengan kesempatan kerja yang lebih baik dengan menjadi pekerja pada industri pariwisata, menjadi supplier atas kebutuhan industri tersebut atau menjadi bagian dari industri pariwisata yang lainnya. Bahkan industri semacam ini juga mampu mendatangkan program-program bantuan melalui CSR perusahaan yang mengembangkan industrinya di wilayah setempat (Ashley *et.all*, 2007). Industri ini bahkan dipercaya dapat memberikan perbaikan ekonomi bagi rakyat miskin melalui manajemen pariwisata yang terbuka dan berkelanjutan. Masyarakat miskin dapat mengakses perbaikan ekonomi melalui: a) Pembangunan usaha mikro pendukung industri pariwisata lokal; b) Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah guna mendukung industri pariwisata; c) Pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan mereka di dalam pengambilan kebijakan dalam sektor pariwisata (Goodwin and Robson, 2004).

Dewi dkk (2014) menjelaskan bahwa kreativitas masyarakat sangat menentukan apakah potensi kepariwisataan memiliki nilai jual yang tinggi atau tidak. Kadar dan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata telah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat desa, terutama pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, dalam tentang pembangunan desa wisata, Dewi dkk (2015) menemukan bahwa kendala utama yang menghambat pertumbuhan desa wisata berasal dari kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai arti penting mengembangkan potensi alam dan potensi budaya yang mereka miliki. Padahal, kedua potensi ini memiliki nilai jual dan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai jual pariwisata di

pedesaan, yaitu: a) mengembangkan web bilingual; b) melakukan pelatihan bahasa Inggris untuk kebutuhan praktis berkomunikasi dengan wisatawan asing; c) melakukan promosi dengan memanfaatkan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program internasional, BKPM dan kantor perwakilan RI di luar negeri; d) mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam paket kegiatan tamu yang berkunjung; dan e) mendorong pemuda secara rutin mengunggah foto-foto dan kegiatan di desa wisata melalui media sosial.

2. Pengelolaan Border Tourism

Hasil penelitian Rachmawati dan Fauzan (2012) menunjukkan pengembangan kawasan perbatasan harus didasarkan potensi kawasan yang bersangkutan yang berlandaskan kesejahteraan masyarakat lokal. *Three Nodes Model* yang diajukan bagi model pengembangan kawasan perbatasan di Merauke merujuk pada industri rumah tangga, pengembangan kapasitas perikanan dan pariwisata perbatasan dengan ditunjang infrastruktur yang memadai bagi ketiga simpul tersebut (Rachmawati dan Fauzan, 2013). Timothy (2002) menggambarkan kerjasama tersebut dalam beberapa tingkatan, yaitu *Alienation*, *Coexistence*, *Cooperation* dan *Collaboration*. *Alienation* merupakan situasi dimana dua negara yang berbatasan tidak memiliki kerjasama yang cukup baik akibat perbedaan ideologi atau persoalan politik di masa lalu. *Coexistence* merupakan tahapan dimana kedua negara sudah memiliki kerjasama meski berada dalam area yang sangat terbatas. *Cooperation* adalah tahapan dimana kedua negara saling bekerja sama untuk memecahkan persoalan bersama terkait dengan perbatasan mereka. *Collaboration* adalah tahapan dimana kedua negara yang berbatasan telah memiliki kerjasama yang cukup stabil dan saling menguntungkan

Hasil penelitian Saepudin *dkk* (2014) menemukan bahwa pengembangan pariwisata perbatasan lebih mengeksplorasi kawasan perbatasan. Meski tidak dapat mengabagalkan sepenuhnya kerjasama antar negara, pengelolaan kawasan perbatasan sebagai pariwisata di Indonesia lebih diutamakan untuk mengembangkan kerjasama

antar sektor yang berbasis pada wisata lingkungan dan budaya. Keunikan kawasan perbatasan ditilik dari kondisi lingkungan dan budaya dapat menjadi modal besar sekaligus murah bagi pariwisata perbatasan.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen utama *indepth interview* untuk mengenali persepsi masing-masing pihak dalam pengelolaan *border tourism* dan upaya merancang gerakan sadar wisata dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan. Data sekunder mengenai potensi kawasan perbatasan di Merauke diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Merauke dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Beberapa dinas terkait dalam pengelolaan perbatasan sekaligus masyarakat perbatasan merupakan narasumber dalam penelitian ini. Persepsi berbagai pihak yang menjadi narasumber dipertemukan dalam *Focus Group Discussion* sebagai jembatan bagi peneliti dengan dinas serta mitra terkait dalam memahami arti pengelolaan perbatasan bagi pariwisata. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, dimana hasil analisis untuk tahun berjalan adalah deskripsi tentang peta pengembangan kawasan pariwisata di kabupaten Merauke.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Pariwisata di Sota

Sejak tahun 2004 kapolsek Sota Aiptu Ma'ruf Suroto mencoba mengembangkan potensi pariwisata Sota karena melihat adanya potensi wisata dengan kedatangan orang luar Sota yang berkunjung ke tugu batas. Tahun 2010 yang bersangkutan memulai berjualan souvenir-souvenir dan mengajak masyarakat disekitar perbatasan. Pada akhirnya masyarakat lokal mulai berjualan hasil bumi,

hasil kerajinan seperti tas, ukiran-ukiran, anyaman, dan masih tampak berjalan sampai sekarang.

Upaya membangun Sota dilakukan dengan bekerjasama dengan pemilik ulayat (pemilik wilayah) dan kepala suku. Pemuda juga berpartisipasi dengan membuat souvenir berbentuk tifa untuk hiasan dan gantungan kunci. Jika musim kunjungan wisatawan mereka berkumpul di perbatasan untuk berjualan. Namun jika tidak ada kunjungan atau hari sedang hujan mereka tidak datang. Dengan karakter seperti itu proses pendampingan memerlukan kesabaran dan ketelatenan.

Kelompok ibu-ibu rumah tangga justru menjadi segmen yang mudah digerakkan. Mereka memiliki kegiatan berkebun dan membuat souvenir. Aiptu Ma`ruf menceritakan: “Saya punya kumpulan ibu-ibu PKK. Tahun lalu kita sudah punya kebun. Tapi Karena sekarang musim hujan. Airnya menggenang, jadi kami belum bisa bergerak. Sayur yang ditanam kangkung, terong, bayam, cabe, untuk konsumsi sehari-hari atau dijual ke tetangga” (Wawancara, 21 April 2017)

Potensi lain yang bisa dikembangkan adalah produksi minyak penyulingan minyak kayu putih. Namun hingga saat ini kesulitan utama dalam produksi minyak kayu putih di Sota adalah pengemasan. Aiptu Ma`ruf menjelaskan bahwa di Sota, bahkan di Papua belum ada pabrik botol. Karenanya selama ini masyarakat Sota memanfaatkan botol suplemen bekas. Bahkan karena keterbatasan alat penyulingan prosesnya pun bergantian antara keluarga. Contohnya Marga Ndiken ada 50 keluarga yang bergantian memproduksi minyak kayu putih. Bapak Niko Ndiken sebagai koordinator, yang bersangkutan juga sebagai Bamuska (Badan Musyawarah Kampung) dan sudah dituakan disana sekaligus mengatur penyulingan (Wawancara, 21 April 2017).

Di Sota, tepatnya di sekitar tugu perbatasan terdapat pasar yang menjajakan aneka souvenir oleh-oleh khas Merauke. Bangunan pasar terdiri dari los sederhana yang ditata kayu berjejer dan meja beton untuk meletakkan barang dagangan. Di atas

meja dibentangkan seutas tali untuk menggantungkan aneka tas, topi dan gantungan kunci. Sementara itu botol-botol kecil aneka bentuk dan warna berjejer di meja, demikian juga the sarang semut yang dikemas dalam plastik. Sepintas terlihat dengan jelas bahwa botol-botol kecil tersebut adalah botol bekas minuman berenergi yang banyak dijual di pasaran. Botol-botol tersebut berisi minyak kayu putih hasil penyulingan penduduk setempat. Di dekat botol –botol minyak kayu putih berjejer pula botol lain yang berisi madu hutan. Sama halnya dengan minyak kayu putih, botol yang digunakan untuk mengemas madu adalah botol bekas dan tanpa merk.

Pada hari-hari biasa kawasan perbatasan di Sota tidak terlalu ramai. Hanya beberapa pengunjung yang nampak berfoto-foto di depan tugu perbatasan RI-PNG atau di depan musamus (sarang semut) raksasa setinggi lebih dari 2 meter, bercakap-cakap dengan penduduk sekitar yang kebetulan sedang duduk di sekitar warung. Kios penjualan pun tidak semuanya terhuni. Penduduk tidak secara rutin berjualan di area perbatasan. Mereka masih menggantungkan pada *event-event* tertentu, misalnya ketika ada tamu atau kunjungan bupati. Pada *event* semacam itu pasar menjadi ramai sekali. Penduduk menjual apapun yang bisa dijual. Tidak hanya souvenir, minyak kayu putih, madu hutan dan teh sarang semut, tetapi juga hasil kebun seperti pisang, pepaya, ketela dan keladi (Wawancara dengan Aiptu Ma’ruf 21 April 2017).

Upaya untuk memajukan kawasan perbatasan di Sota sudah pernah dilakukan oleh pemda kabupaten Merauke. Gagasan yang muncul adalah mengembangkan Sota sebagai sebuah kawasan *ecotourism* atau wisata lingkungan. Namun gagasan tersebut gagal untuk dikembangkan. Menurut Aiptu Ma’ruf *ecotourism* kurang dikembangkan dan dikelola dengan baik, sehingga tidak menarik perhatian orang untuk datang.

2. Pemberdayaan Masyarakat

¹ Tantangan terbesar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Sota adalah kesabaran dan ketelatenan untuk terus-menerus mengajak masyarakat maju dan berkembang. Aiptu Ma'ruf yang sudah lama sekali berbaur dengan masyarakat Sota mengemukakan pengalamannya. Melalui FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang mencakup perwakilan ² tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lainnya. FKPM dijadikan media untuk berembung hal-hal berkaitan dengan wilayah Sota. Perwakilan untuk satu distrik biasanya ada perwakilan dari Danramil, dunia Pendidikan seperti guru-guru dan kepala sekolah, tokoh agama dari Islam, Khatolik, Hindu, Budha dan sebagainya. Selain FKPM terdapat juga Polmas, dimana masyarakat menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Polmas masih berjalan sampai sekarang (Wawancara dengan Aiptu Ma'ruf, 21 April 2017).

Kesimpulan

Tantangan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan pariwisata di perbatasan adalah adanya perbedaan persepsi dalam pengelolaan perbatasan. Kejelasan dan otoritas organisasi pengelola perbatasan perlu diperjelas, dimana pemerintah pusat dan lokal perlu merumuskan sebuah kebijakan dan program yang mampu memberikan pondasi bagi pengembangan aktivitas sosial ekonomi di perbatasan melalui pemberdayaan masyarakat lokal di perbatasan.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan "sadar wisata perbatasan" dalam rangka mengembangkan pariwisata perbatasan merupakan pendekatan yang dapat dijadikan sebuah pijakan untuk membangun ketahanan sosial ekonomi masyarakat perbatasan, dimana melalui pendekatan ini masyarakat lokal dapat memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi budaya dan lingkungan yang ada di sekelilingnya guna meningkatkan kesejahteraan. Kesadaran dan kemauan masyarakat merupakan modal utama pengembangan pariwisata perbatasan dengan dukungan pemerintah lokal dan pusat.

Untuk pemerintah daerah setempat, tidak dapat hanya berorientasi jangka pendek karena merubah sikap dan perilaku masyarakat agar sadar wisata perbatasan harus diawali dengan merubah *mindset* yang mengarah pada filosofi *demand* dan *supply*. *Demand* diciptakan dalam diri masyarakat terhadap pengelolaan wisata perbatasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sehingga muncul kesadaran perlunya potensi wisata yang ada dikelola, sedangkan *supply* dapat dibangun oleh pemerintah daerah, forum masyarakat, organisasi pemerhati pariwisata, perguruan tinggi dalam bentuk dukungan kebijakan, program, pengetahuan dan ketrampilan untuk menggali sumber daya dan potensi yang ada di wilayah perbatasan agar menarik wisatawan. Pada akhirnya, *integrated approach* yang melibatkan banyak stakeholder wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pengelolaan wisata perbatasan.

REFERENSI

- Ashley,Caroline, Peter DeBrine, Amy Lehr dan Hannah Wilde. 2007."The Role of the Tourism Sector in Expanding Economic Opportunity". Corporate Social Responsibility Initiative Report No.23. Cambridge,MA: Kennedy School of Government, Harvard University.
- Arsana, I Made Andi. 2010. "Penyelesaian Sengketa Ambalat dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Geoyuridis". Paper Lomba Olimpiade karya Tulis Inovatif PPI Paris, Perancis tahun 2009.
- Padan, Belinda. 2015. "Startegi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kayan Selatan. *eJournal Pemerintahan Integratif* 2015,3(1): 175-189 ISSN 2337-8670.
- Dewi, Machya Astuti,dkk. 2015. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis People-to-People-Contact di Provinsi DIY*, Laporan Penelitian Strategis Nasional Tahun 1, Ditlitabmas, 2014. Tidak Dipublikasikan.
- , *Pengembangan Desa Wisata Berbasis People-to-People-Contact di Provinsi DIY*, Laporan Penelitian Strategis Nasional Tahun 2, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dikti, 2015.
- Dritsakis, Nikolaos. 2012."Tourism Development and Aconomic Growth in Seven Mediterranean Countries: A Panel Data Approach".*Tourism Economic*.Vol. 18, No. 4. Paper lengkap dapat diakses melalui http://users.uom.gr/~drits/publications/TOURISM_DEVELOPMENT.pdf
- Goodwin, Dr Harold and Stuart Robson .2004. "*Tourism and Local Economic Development: How can businesses in travel and tourism increase the*

- contribution of the industry to local economic development and pro-poor growth?”*.http://www.haroldgoodwin.info/resources/Flyer_Final.pdf
- Partnership. 2011. Partnership Policy Paper No. 2/2011 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/20111125095137.Policy%20Brief%202%20PSG%20arsip_2.pdf
- Peraturan BNPP No. 3 Tahun 2011. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011. <http://www.djpp.kemendikham.go.id/arsip/bn/2011/bn46-20111mp1.PDF>
- Rachmawati, Iva dan Fauzan. 2012. “Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN 1410-4946 Volume 16, Nomor 2, November 2012 (95-186)
- , 2013. *Menuju Kabupaten Merauke Provinsi Papua Sebagai Model Pengembangan Kawasan di Indonesia Bagian Timur*. Penelitian Klaster. LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Saepudin, Asep, Iva Rachmawati dan Fauzan. 2014. *Model Pengembangan Border Tourism bagi Kawasan Perbatasan Studi Kasus: Sota, Merauke, Papua*. Jurnal Manajemen, Akutansi dan Ekonomi Pembangunan .ISSN 1410-2293.
- Sasmini, 2007. “Staretki Pengelolaan dan Pengamanan Pulau-Pulau Terluar oleh Pemeirntah Indonesia (Analisis Berdasarkan United Nations Covention on the Law of the Sea / UNCLOS 1982)”. *Yustisia*. Edini No. 71 Mei-Agustus 2007.
- Timothy, D.J. 2002. ” Tourism in Borderlands: Competition, Complementarity, and Cross Border Cooperation”. Dalam Krakover, S. and Gradus, Y (eds) *Tourism in Frontier Areas*. Lexington Books: Maryland.
- Wawancara dengan Wilu, 19 April 2017.
- Wawancara dengan Aiptu Ma’ruf, 21 April 2017.

Pemberdayaan Masyarakat

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to iGroup

Student Paper

2%

2

banggaikep.go.id

Internet Source

<1%

3

es.scribd.com

Internet Source

<1%

4

docplayer.info

Internet Source

<1%

5

kabar24.bisnis.com

Internet Source

<1%

6

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On